DIGITALISASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN SISTEM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS): *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*

Nova Triana Hakim[1], Linatul Karomah[2], Indria Nurfadanti[3], Yantoro[4]

[1,2,3,4]*Universitas Jambi*
E-mail : indrianurfadantinzl@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Salah satu aspek yang mengalami perubahan adalah pengelolaan pembiayaan pendidikan, khususnya dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji berbagai literatur terkait digitalisasi pembiayaan pendidikan dan implementasinya dalam pengelolaan dana BOS di Indonesia. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menganalisis berbagai artikel ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, dan laporan lembaga internasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi melalui sistem seperti ARKAS, SIPLah, Dapodik, dan BOS Salur mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas pengelolaan keuangan sekolah. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kompetensi digital sumber daya manusia, serta risiko keamanan data. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi pembiayaan pendidikan memerlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas pengguna, serta penguatan sistem pengawasan dan keamanan informasi.

Kata Kunci : *Digitalisasi Pendidikan, Pembiayaan Pendidikan, BOS, ARKAS, Transparansi Keuangan.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola organisasi publik, termasuk lembaga pendidikan. Digitalisasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai penggunaan perangkat teknologi, tetapi telah menjadi strategi transformasi organisasi yang mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks pendidikan, digitalisasi tidak hanya diterapkan dalam proses pembelajaran, tetapi juga pada sistem administrasi dan pengelolaan keuangan pendidikan. Menurut laporan OECD (2021), pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pendidikan mampu meningkatkan efisiensi tata kelola, mempercepat proses administrasi, dan mendukung transparansi pengelolaan sumber daya pendidikan.

Di Indonesia, pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek strategis yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan yang besar melalui berbagai program, salah satunya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS dirancang untuk membantu sekolah memenuhi kebutuhan operasional sehingga peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang tinggi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, dana BOS diberikan kepada sekolah berdasarkan jumlah peserta didik dan digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional pendidikan (Kemendikbudristek, 2023).

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS masih menghadapi sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi keterlambatan pelaporan, kesalahan administrasi, rendahnya transparansi penggunaan dana, serta lemahnya sistem pengawasan keuangan sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Bove dan Di Leo (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan dana pendidikan yang tidak didukung sistem informasi yang baik berpotensi menimbulkan inefisiensi dan menurunkan tingkat akuntabilitas lembaga pendidikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi dalam tata kelola pembiayaan pendidikan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara lebih efektif.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai platform digital yang mendukung pengelolaan dana pendidikan. Sistem tersebut meliputi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah), Dapodik (Data Pokok Pendidikan), dan BOS Salur. Keberadaan sistem-sistem tersebut memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, pelaporan, dan pengawasan anggaran dilakukan secara terintegrasi dan berbasis data. Menurut penelitian Supriyadi et al. (2024), integrasi sistem digital dalam pembiayaan pendidikan mampu meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan dan mempermudah proses monitoring penggunaan dana sekolah.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi sistem digital seperti ARKAS, SIPLah, dan Dapodik dalam pengelolaan dana BOS, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis penggunaan aplikasi dan efektivitas administrasi keuangan. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan berbagai sistem digital tersebut dalam perspektif tata kelola pembiayaan pendidikan masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji keterkaitan digitalisasi pembiayaan pendidikan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan tata kelola pendidikan secara komprehensif. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui sintesis berbagai hasil penelitian yang relevan

sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai digitalisasi pembiayaan pendidikan dalam pengelolaan dana BOS.

Namun demikian, implementasi digitalisasi pembiayaan pendidikan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Berbagai penelitian menemukan bahwa keberhasilan transformasi digital dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kemampuan pengguna, dukungan organisasi, serta budaya kerja yang berkembang di lingkungan sekolah. World Bank (2020) menegaskan bahwa teknologi hanya akan memberikan dampak optimal apabila diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan tata kelola organisasi. Oleh karena itu, kajian mengenai digitalisasi pembiayaan pendidikan perlu dilakukan secara lebih komprehensif agar dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai manfaat, tantangan, dan peluang pengembangannya di masa depan.

Literature Review

Digitalisasi Pembiayaan Pendidikan

Digitalisasi pembiayaan pendidikan dapat dipahami sebagai proses transformasi pengelolaan keuangan pendidikan dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi ini mencakup seluruh tahapan manajemen keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan program, pengawasan, hingga pelaporan keuangan secara elektronik. Menurut Arwildayanto, Lamatenggo, dan Sumar (2017), pengelolaan keuangan pendidikan yang berbasis teknologi memungkinkan organisasi pendidikan melaksanakan fungsi manajemen secara lebih efektif karena data dapat diakses secara cepat, akurat, dan terintegrasi.

Dalam perspektif tata kelola publik, digitalisasi pembiayaan pendidikan merupakan bagian dari implementasi konsep good governance. United Nations (2020) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi publik berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas pelayanan publik. Dalam konteks pendidikan, sistem digital memungkinkan setiap transaksi keuangan terdokumentasi secara sistematis sehingga mempermudah proses audit dan pengawasan. Dengan demikian, peluang terjadinya penyimpangan anggaran dapat diminimalkan.

Selain itu, digitalisasi juga mendukung penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS). Menurut Mulyasa (2018), sekolah yang menerapkan MBS diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya pendidikan, termasuk sumber daya keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu menjamin penggunaan dana secara efektif dan akuntabel. Kehadiran aplikasi digital memberikan kemudahan bagi sekolah dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan nyata satuan pendidikan.

Dari perspektif teknologi informasi, keberhasilan implementasi sistem digital sangat dipengaruhi oleh penerimaan pengguna terhadap teknologi yang digunakan. Davis (1989) melalui Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa seseorang akan menerima dan menggunakan teknologi apabila teknologi tersebut dianggap mudah digunakan (perceived ease of use) dan memberikan manfaat yang nyata (perceived usefulness). Dalam konteks pengelolaan dana BOS, keberhasilan implementasi ARKAS dan SIPLah sangat dipengaruhi oleh persepsi kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah terhadap kemudahan penggunaan aplikasi tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode literature review dipilih karena bertujuan untuk

mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan digitalisasi pembiayaan pendidikan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Snyder (2019), literature review merupakan metode penelitian yang memungkinkan peneliti membangun pemahaman konseptual yang lebih komprehensif melalui analisis terhadap berbagai publikasi ilmiah yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan lembaga internasional yang dipublikasikan pada rentang tahun 2019–2025. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan ERIC Database menggunakan kata kunci "digitalization of education financing", "school operational assistance fund", "education financial management", "digital governance in education", "ARKAS", dan "SIPLah".

Tahapan penelitian mengacu pada model systematic review yang dikembangkan oleh Snyder (2019), yaitu identifikasi literatur, seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, analisis isi (content analysis), sintesis temuan penelitian, dan penarikan kesimpulan. Literatur yang dipilih merupakan artikel yang memiliki relevansi tinggi terhadap digitalisasi pembiayaan pendidikan serta membahas aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan dana pendidikan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini dilakukan dengan mengelompokkan berbagai hasil penelitian ke dalam tema-tema utama, yaitu konsep digitalisasi pembiayaan pendidikan, implementasi sistem digital dalam pengelolaan dana BOS, manfaat digitalisasi, tantangan implementasi, serta implikasi kebijakan terhadap tata kelola pendidikan. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan digitalisasi pembiayaan pendidikan di Indonesia.

Tabel 1. Sintesis Literatur

Penulis	Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama
Davis	1989	Technology Acceptance Model	Penerimaan teknologi dipengaruhi kemudahan dan kebermanfaatan
OECD	2021	Digitalisasi Pendidikan	Digitalisasi meningkatkan efisiensi dan transparansi
World Bank	2020	Teknologi dalam Pembiayaan Pendidikan	Kompetensi SDM menentukan keberhasilan digitalisasi
Supriyadi et al.	2024	Transformasi Digital Pembiayaan Pendidikan	Integrasi sistem digital meningkatkan efektivitas pengelolaan dana
Mubarok et al.	2024	ARKAS dan Transparansi Keuangan	ARKAS meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah
Musirah et al.	2024	Risiko Fraud Digital	Digitalisasi memerlukan penguatan keamanan data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Digitalisasi Pembiayaan Pendidikan

Digitalisasi pembiayaan pendidikan merupakan proses transformasi tata kelola keuangan pendidikan dari sistem manual menuju sistem berbasis teknologi informasi. Transformasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat digital, tetapi juga mencakup perubahan

proses kerja, budaya organisasi, dan mekanisme pengambilan keputusan berbasis data. Menurut OECD (2021), digitalisasi sektor pendidikan memungkinkan peningkatan efisiensi administrasi dan kualitas tata kelola melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi.

Dalam konteks pendidikan, digitalisasi pembiayaan mencakup proses perencanaan anggaran, pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan keuangan yang dilakukan secara elektronik. Arwildayanto et al. (2017) menjelaskan bahwa sistem keuangan berbasis digital memungkinkan sekolah memperoleh informasi keuangan secara cepat, akurat, dan transparan sehingga dapat meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan. Digitalisasi juga mendukung penerapan prinsip manajemen berbasis sekolah karena setiap keputusan keuangan dapat didasarkan pada data yang tersedia secara real-time.

Lebih lanjut, digitalisasi pembiayaan pendidikan berkaitan erat dengan konsep good governance. Menurut United Nations (2020), penerapan teknologi digital dalam administrasi publik mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam pengelolaan dana pendidikan, teknologi digital berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang memungkinkan setiap transaksi tercatat secara sistematis sehingga meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan anggaran.

Implementasi Sistem Digital dalam Pengelolaan Dana BOS

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai platform digital untuk mendukung pengelolaan dana BOS. Salah satu sistem yang memiliki peran penting adalah ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Sistem ini digunakan oleh sekolah untuk menyusun perencanaan anggaran, melaksanakan pengelolaan keuangan, dan menyusun laporan penggunaan dana secara terintegrasi. Hasil penelitian Aliyah et al. (2024) menunjukkan bahwa penggunaan ARKAS mampu meningkatkan ketepatan penyusunan RKAS serta mempermudah proses pelaporan keuangan sekolah.

Selain ARKAS, pemerintah juga mengembangkan SIPLah sebagai platform digital pengadaan barang dan jasa di sekolah. Kehadiran SIPLah memberikan kemudahan bagi sekolah dalam melakukan pengadaan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui sistem ini, seluruh transaksi dapat dipantau secara daring sehingga risiko manipulasi data maupun praktik pengadaan yang tidak sesuai prosedur dapat diminimalkan.

Sistem digital lainnya adalah Dapodik dan BOS Salur. Dapodik berfungsi sebagai basis data utama yang digunakan pemerintah dalam menentukan alokasi dana BOS berdasarkan jumlah peserta didik dan kondisi sekolah. Sementara itu, BOS Salur memungkinkan penyaluran dana secara langsung ke rekening sekolah. Menurut Kemendikbudristek (2023), integrasi antara Dapodik, ARKAS, SIPLah, dan BOS Salur menciptakan ekosistem digital yang mendukung efektivitas pengelolaan pembiayaan pendidikan secara nasional.

Dampak Digitalisasi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Dana BOS

Salah satu manfaat utama digitalisasi pembiayaan pendidikan adalah meningkatnya transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Sistem digital memungkinkan seluruh proses keuangan terdokumentasi secara otomatis sehingga dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Mubarok et al. (2024) menyatakan bahwa digitalisasi mampu memperkuat mekanisme pengawasan karena data penggunaan anggaran tersedia secara real-time dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas juga mengalami peningkatan melalui penerapan sistem digital. Sebelum adanya digitalisasi, proses pelaporan keuangan sekolah sering menghadapi berbagai kendala seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, dan ketidaksesuaian data. Dengan adanya sistem digital, proses pelaporan menjadi lebih terstruktur dan terstandarisasi. Hal ini sejalan

dengan penelitian World Bank (2020) yang menyatakan bahwa digitalisasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan melalui penyediaan data yang lebih akurat dan mudah diverifikasi.

Selain itu, transparansi yang meningkat dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan. Masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai penggunaan dana BOS. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan kualitas administrasi keuangan tetapi juga memperkuat legitimasi pengelolaan dana publik di sektor pendidikan.

Tantangan Implementasi Digitalisasi Pembiayaan Pendidikan

Meskipun memberikan banyak manfaat, implementasi digitalisasi pembiayaan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil. Ketersediaan jaringan internet yang tidak merata menyebabkan beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam mengakses sistem digital secara optimal. Kondisi ini mengakibatkan kesenjangan dalam implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan

Tantangan lainnya adalah rendahnya kompetensi digital tenaga pendidik dan tenaga administrasi sekolah. Menurut World Bank (2020), keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kemampuan pengguna dalam mengoperasikan teknologi yang tersedia. Apabila kompetensi digital masih rendah, maka sistem yang seharusnya meningkatkan efisiensi justru berpotensi menambah beban kerja administratif.

Aspek keamanan data juga menjadi perhatian penting. Musirah et al. (2024) mengungkapkan bahwa digitalisasi membuka peluang terjadinya kebocoran data, manipulasi informasi, dan berbagai bentuk fraud berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan siber yang kuat serta mekanisme pengawasan yang berkelanjutan agar integritas data keuangan pendidikan dapat terjaga dengan baik**.**

Faktor Pendukung dan Penghambat Digitalisasi Pembiayaan Pendidikan

Keberhasilan implementasi digitalisasi pembiayaan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang berasal dari aspek sumber daya manusia, organisasi, dan kebijakan. Berdasarkan berbagai penelitian yang dianalisis, faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan sekolah, dukungan kebijakan pemerintah, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta kompetensi digital tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Davis (1989), tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu sistem informasi.

Selain faktor pendukung, terdapat pula berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas digitalisasi pembiayaan pendidikan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan jaringan internet, kurangnya pelatihan bagi operator sekolah, resistensi terhadap perubahan, serta tingginya ketergantungan pada tenaga administrasi tertentu. World Bank (2020) menegaskan bahwa transformasi digital sering mengalami hambatan ketika organisasi belum memiliki kesiapan budaya dan sumber daya manusia yang memadai.

Lebih lanjut, tantangan lainnya adalah belum meratanya kualitas infrastruktur teknologi antarwilayah. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan cenderung lebih siap dalam mengimplementasikan sistem digital dibandingkan sekolah yang berada di wilayah terpencil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pembiayaan pendidikan memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga pada penguatan kapasitas organisasi dan pemerataan akses teknologi.

Implikasi Digitalisasi terhadap Tata Kelola Pendidikan

Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang dianalisis, digitalisasi pembiayaan pendidikan memiliki implikasi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pendidikan. Digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen reformasi birokrasi pendidikan yang mendukung terciptanya tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Ke depan, pengembangan digitalisasi pembiayaan pendidikan perlu diarahkan pada integrasi sistem yang lebih kuat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan keamanan data. Selain itu, pemerintah perlu memastikan pemerataan infrastruktur teknologi agar seluruh sekolah dapat memperoleh manfaat yang sama dari transformasi digital. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

KESIMPULAN

Digitalisasi pembiayaan pendidikan merupakan bentuk transformasi tata kelola keuangan pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan. Berdasarkan hasil kajian literatur, digitalisasi pembiayaan pendidikan di Indonesia diwujudkan melalui berbagai platform seperti ARKAS, SIPLah, Dapodik, dan BOS Salur yang terintegrasi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keberadaan sistem tersebut telah memberikan kontribusi positif dalam mempercepat proses administrasi, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, memperkuat mekanisme pengawasan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa digitalisasi berperan penting dalam mewujudkan prinsip good governance melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Sistem digital memungkinkan seluruh transaksi keuangan terdokumentasi secara sistematis dan dapat dipantau secara real-time oleh berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, potensi terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan penggunaan anggaran dapat diminimalkan.

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi pembiayaan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kompetensi digital sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, serta risiko keamanan data. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas pengguna, penguatan sistem keamanan informasi, dan pemerataan akses teknologi di seluruh satuan pendidikan.

Secara keseluruhan, digitalisasi pembiayaan pendidikan merupakan langkah strategis dalam mendukung reformasi tata kelola pendidikan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Apabila didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur yang memadai, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, digitalisasi pembiayaan pendidikan berpotensi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana pendidikan dan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arwildayanto, A., Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan. Gorontalo: Widya Padjadjaran.

Bove, I., & Di Leo, S. (2020). Educational financing and welfare: Evidence from higher education institutions. International Journal of Educational Development, 74, 102170.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Kemendikbudristek. (2023). Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Mulyasa, E. (2018). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

OECD. (2021). Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/589b283f-en

Supriyadi, M. Y., Nugroho, A., & Pratama, R. (2024). Transformasi digital dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan, 12(2), 145–158.

United Nations. (2020). E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. New York: United Nations.

World Bank. (2020). The Role of Technology in Education Financing and Management. Washington, DC: World Bank.